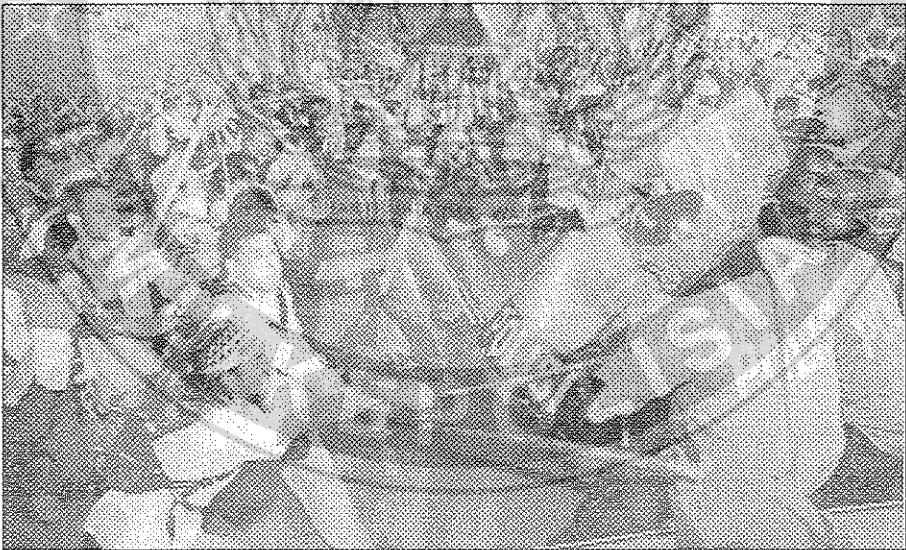


## Mengapa Polri Sangat Terpuruk?

Oleh : Kol. Pol. Drs. Djunaidi Maskat. H.

Pada waktu mendengarkan berita sore khususnya pada acara "Perspektif" yaitu wawancara dengan DR. A. S. Adnan Putra, dengan pokok bahasan keterpurukan Polri pada kondisi dewasa ini. Malah menurut pak Adnan Putra kondisi Polri dewasa ini sangat terpuruk. Keterpurukan tersebut karena kondisi masyarakat yang dihadapi Polri itu sendiri. Disatu pihak

masyarakat yang sedang berubah menginginkan kondisi baru, masyarakat yang menghargai hak azasi manusia, demokratis, civil society, atau masyarakat madani. Dipihak lain masyarakat yang menginginkan kondisi statusquo, yang menginginkan kondisi seperti sebelumnya. Kondisi seperti inilah menurut Pak Adnan Putra membingungkan bagi Polri. Disamping



itu masyarakat kita yang telah memberi peluang kepada Polri untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, antara lain pengurusan SIM masyarakat ingin cepat dengan membayar lebih, dan sebagainya. Hal inilah yang menurut pak Adnan Putra menjadikan Polri sangat terpuruk.

Sesungguhnya kondisi Polri yang sangat terpuruk, masih banyak sekali yang mempengaruhi dan sangat kompleks. Hal ini perlu penulis sampaikan agar masyarakat mengetahui kondisi Polri yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kalau bagian masyarakat itu sendiri sedang sakit, tentu masyarakat itu juga sakit. Oleh karenanya perlu kita perbaiki bersama kondisi Polri yang sedang sangat terpuruk ini.

Selain yang disampaikan pak Adnan Putra di TV pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 1998 yang lalu, penulis perlu sampaikan faktor lainnya, antara lain profesionalisme yang terhambat keberdayaan Polri yang belum optimal, *Police Ratio Population* yang sangat



Masyarakat mengetahui kondisi Polri yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Kalau bagian masyarakat itu sendiri sedang sakit, tentu masyarakat itu juga sakit. Oleh karenanya perlu kita perbaiki bersama kondisi Polri yang sedang sangat terpuruk ini.

rendah, perlengkapan dan sumber dana yang sangat rendah serta manajemen yang belum optimal, itu semua disebabkan karena Polri diatur dengan kebijaksanaan serendah-rendahnya (masih sangat rendah) dan sentralisasi. Profesionalisme Polri tersebut terhambat, karena ada beberapa faktor yang menjadikan Polri sulit menjadi lembaga yang benar-benar profesional. Faktor tersebut antara lain sistem pendidikan belum optimal membentuk perilaku trampil, kemudian sistem pembinaan karier belum pula mampu mendorong potensi para anggota Polri ke arah profesional dan produktif, serta sistem sentralisasi yang menjadikan kurang memberdayakan anggota Polri melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam sistem pendidikan Polri, masih mengandalkan *teaching oriented*, dimana pola pengajaran masih bertumpu pada pengajaran dalam menyampaikan pelajaran, siswa banyak pasif, hanya mendengarkan yang relatif lebih murah. Pola ini belum mengarah pada latihan atau praktek yang mengandalkan *student oriented*, dimana siswa aktif dan pengajar sebagai pembimbing. Perilaku trampil banyak dipengaruhi oleh metode *student oriented*. Apabila memilih metode ini, maka disetiap lembaga pendidikan perlu memiliki *work shop* yang cukup banyak antara lain *work shop* oleh TKP, *work shop* pengaturan lalu lintas, *work shop* pemeriksaan, dan sebagainya. Jumlah *work shop* tersebut paling tidak satu peleton (30 siswa) tersedia satu set *work shop*. Kemudian tenaga pelatih diperlukan cukup besar, tiap satu peleton diperlukan 4 orang pelatih. Jadi bila satu SPN mendidik 600 siswa, berarti diperlukan 80 orang tenaga pendidik (Gadik) yang operasional, yang istirahat paling tidak ada 80 Gadik. Jadi untuk 600 siswa harus disiapkan paling tidak 160

Gadik yang benar-benar terampil. Bila di lembaga pendidikan yang mendidik 1500 siswa, maka diperlukan 400 Gadik yang terlatih.

Sedangkan pada dewasa ini tenaga pendidik disetiap lembaga pendidikan kuantitas dan kualitasnya masih belum mencukupi seperti yang penulis jelaskan, sarana - prasarannya hanya ruang kelas saja, sedangkan work shop yang penulis jelaskan masih sangat mirim.

Disamping sistim pendidikan yang berpengaruh besar terhadap profesionalisme Polri, terdapat pula sistem pembinaan personel, khususnya pembinaan karier, seperti instansi pemerintah lainnya, masih belum mendayagunakan secara optimal potensi SDM yang ada. Hal ini disebabkan belum adanya tolok ukur keberhasilan. Akibat dari tidak adanya tolok ukur keberhasilan, maka orang yang berhasil atau tidak berhasil sangat dipengaruhi oleh penilaian subyektif oleh penentu kebijaksanaan di bidang personel. Banyak personel atau pejabat yang kurang peduli kepada aspek pembinaan personel yang mengarah pada pelatihan, pendidikan dan sebagainya (yang kurang dapat dilihat hasilnya secara nyata). Mereka banyak berupaya yang dapat diamati secara langsung hasilnya, misalnya bangunan (yang berbentuk fisik). Kadang-kadang upaya yang tidak ada relevansinya dengan tugas pokoknya, dengan mengorbankan pembinaan personel. Sebagai contoh, pernah terjadi di lembaga pendidikan 1/3 jumlah siswa kerja bhakti membangun lembaga pendidikan, ada lagi yang membangun lapangan golf, ada lagi yang membuat kebun binatang di lembaga tersebut. Bila ditelusuri berapa besar kerugian Polri, karena jumlah siswa yang tidak belajar, tentunya tidak memenuhi syarat kelulusan sebagai Polri, namun mereka diluluskan sebagai anggota Polri yang

memiliki wewenang besar. Suatu tindakan yang berbahaya bagi diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Masalah sentralisasi, juga masih mewarnai birokrasi pemerintahan termasuk di Polri, yang menghambat profesionalisme. Pemberdayaan bawahan (empowering) rupanya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan, khususnya dalam melaksanakan UU No. 28 tahun 1997. Kalau tidak maka akan timbul keragu-raguan, dan profesionalisme terhambat. Pernah ada seorang kepala lembaga pendidikan mengeluarkan siswanya karena dipandang mental siswa tersebut yang tidak pantas jadi seorang Perwira. Setelah dikukuhkan pengeluaran siswa oleh pejabat yang berwenang, kemudian di anulir oleh pimpinan di atasnya karena ada famili yang dikenalnya, siswa tersebut tetap lulus, hanya ditangguhkan kelulusannya. Hal ini juga akan mempengaruhi perilaku pejabat bawahan, ke arah "safety player", menumpulkan inisiatif, ragu-ragu dalam bertindak.

## KEBERADAAN POLRI

Pada dewasa ini ramai dibicarakan, sebaiknya Polri berada dimana? dibawah Dep. Hankam, dibawah Dep. Dagri, dibawah Presiden, atau dimana?

Di dunia ini keberadaan Polisi selalu menjadi perhatian para pemegang kekuasaan, karena wewenang polisi itulah yang dapat "digunakan" sebagai alat kekuasaan yang efektif. Ada berita terakhir bahwa Polri dibawah langsung Presiden dan pelaksana harian oleh Dep. Dagri. Di sini yang penulis khawatirkan adalah Polri nantinya akan digunakan sebagai alat kekuasaan manakala pejabat penentu Jabatan Kapolri, Kapolda berada pada kekuasaan tunggal (Presiden atau Menteri). Kalau jabatan

tersebut ditentukan oleh Presiden atau Menteri, maka Polri akan mudah terbawa ke arah alat kekuasaan. Inilah salah satu faktor keterpurukan Polri pada dewasa ini.

Untuk mengatasi hal ini, seyogyanya penentuan jabatan Kapolri dan Kapolda ditentukan Dewan Independen dibentuk DPR, presiden hanya mengeluarkan pengesahannya saja. Jepang menganut model semacam ini. Dari model ini maka Polri mampu menangkap/menindak siapa saja yang melanggar hukum, tidak peduli apa jabatannya apalagi keluarga pejabat, karena kekuatan/kekuasaan luar tidak dapat campur tangan tindakan Polri tersebut. Memang disini harus secara khusus memandang Polri, karena wewenang Polri demikian besar. Bila wakil rakyat tidak ikut mengontrol, maka Polri akan mudah jadi alat kekuasaan kelompok tertentu. Apabila kelompok tertentu jatuh atau terpuruk, maka Polri jelas ikut terpuruk. Oleh karenanya hal ini harus diwaspadai oleh para wakil rakyat.

## PERLU MERUBAH MANAJEMEN POLRI

Manajemen Polri dewasa ini berperan pula dalam menjadikan keterpurukan Polri. Di Polri,



Di dunia ini keberadaan Polisi selalu menjadi perhatian para pemegang kekuasaan, karena

wewenang polisi itulah yang dapat "digunakan" sebagai alat kekuasaan yang efektif.

yang menjadi jantungnya adalah Polres dan Polsek, karena kesatuan inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang secara langsung melaksanakan tugas kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Oleh karena kesatuan ini yang harus diperkuat baik personel (SDM), peralatan, maupun anggaran operasionalnya. Para Kapolres dan Kapolsek adalah *nerve centre* yang harus dipilih personel yang terbaik pada levelnya. Begitu juga para stafnya harus benar-benar orang yang mampu dan terlatih. Oleh karenanya kebijaksanaan dan strategi harus diarahkan ke sini. Polda menjadi kesatuan yang menjabarkan kebijaksanaan dan strategi untuk diimplementasikan Polres dan Polsek. Disamping itu Polda menjadi tempat mempersiapkan personel yang benar-benar profesional di lapangan.

Disamping pola tersebut, dewasa ini perlu dipikirkan penerapan management contingency, yang intinya di Indonesia ini daerahnya dapat dibagi menjadi empat model yaitu :

- 1) daerah yang mempunyai kompleksitasnya tinggi dan perubahannya tinggi pula. Misalnya Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan. Daerah ini memerlukan pejabat yang memiliki kualitas prediksi dan mampu membuat rencana strategis cukup baik. Kejahatan apa yang akan muncul dapat diperkirakan dan cara penanggulangannya telah disiapkan sejak dini. Disamping itu pejabat disini diperlukan orang yang memiliki kemampuan koordinator yang handal, yaitu mengkoordinir potensi-potensi yang ada diwilayahnya untuk dimanfaatkan untuk menanggulangi gangguan Kamtibmas.

- 2) Daerah yang kompleks tetapi tidak cepat berubah. Daerah ini adalah daerah kota-kota besar yang relatif stabil (Palembang, Ujung Pandang, Manado, dan sebagainya). Pada daerah ini diperlukan pejabat yang memiliki kemampuan koordinator yang handal. Kemampuan tersebut untuk mengkoordinir komponen-komponen yang ada guna menanggulangi ancaman yang ada.
- 3) Daerah yang tidak begitu kompleks, tetapi perubahannya cepat. Daerah ini adalah daerah-daerah penyangga kota model satu di depan (Tangerang, Bekasi, Depok, Mojokerto, dan sebagainya). Pejabat disini diperlukan ketrampilan prediksi dan perencanaan strategis cukup baik, karena gejala gangguan Kamtibmas perlu diprediksi dan disiapkan pola penanggulangannya.
- 4) Daerah yang tidak kompleks dan tidak cepat berubah. Daerah-daerah pedesaan/pedalaman. Pejabat disini diperlukan kemampuan menjaga situasi harmonis baik di lingkungan kantor maupun ke instansi samping, sehingga kondisi stabilitas dapat terjaga dengan baik. Dari empat model daerah tersebut ditentukan pejabat yang tepat sesuai persyaratan kriteria sebagaimana dijelaskan di depan. Demikian pula strukturnya akan berbeda walaupun sama levelnya (Polres atau Polsek). Oleh karenanya model ini tidak dapat seragam struktur organisasi dan pangkat pada jenis jabatan yang sama.

Disamping faktor-faktor tersebut di depan, ada faktor yang cukup serius dihadapi Polri



Manajemen Polri dewasa ini berperan pula dalam menjadikan keterpurukan Polri. Di Polri, yang

menjadi jantungnya adalah Polres dan Polsek, karena kesatuan inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yang secara langsung melaksanakan tugas kepolisian yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

yaitu tentang jumlah Polri yang sangat rendah dibanding jumlah penduduk (Police ratio Population) yaitu 1 : 1200 (paling rendah di dunia). Kita harus berupaya mempercepat penambahan jumlah Polri ini, dengan cara menunda pensiun sampai usia 60 tahun, dan metode pendidikan 3 bulan latihan dasar kepolisian, praktek 1 tahun, kemudian 3 bulan lagi pendidikan pengembangan. Dengan model ini, maka dengan anggaran yang sama dapat merekrut 3 kali jumlah rekrutmen yang ada sekarang ini (bisa sampai 30.000 tiap tahun).

Demikianlah pokok pikiran untuk mengatasi keterpurukan Polri dewasa ini. Semoga berhasil, dan sekali lagi terimakasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif menentukan masa depan Polrinya.